

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kota Padang Panjang sebagai kota non-IHK, melakukan pemantauan harga pangan sebagai kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah. Dalam pelaksanaannya, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang, pemantauan harga dilakukan setiap hari kerja langsung ke Pasar Pusat Padang Panjang. Kedua OPD tersebut melakukan pemantauan harga untuk total 48 (empat puluh delapan) komoditas yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Beras Kualitas I
2. Beras Kualitas II
3. Beras Kualitas III
4. Gula Pasir
5. Minyak Goreng Kemasan Sederhana
6. Minyak Goreng Kemasan Premium
7. Minyak Goreng Curah
8. Tepung Terigu Segitiga Biru
9. Tepung Terigu Cakra
10. Tepung Terigu Lencana
11. Daging Sapi
12. Daging Ayam Broiler
13. Daging Ayam Kampung Besar
14. Daging Ayam Kampung Sedang
15. Daging Ayam Kampung Kecil
16. Telur Ayam Ras
17. Telur Ayam Kampung
18. Telur Itik
19. Cabai Hijau
20. Cabai Rawit
21. Cabai Merah
22. Bawang Merah
23. Bawang Putih
24. Susu Kental Manis (Bendera)
25. Susu Kental Manis (Indomilk)
26. Susu Bubuk 400gr
27. Susu Bubuk (Indomilk) 400gr
28. Garam Beryodium Kasar
29. Garam Beryodium Halus (250gr)
30. Kacang Kedele
31. Kacang Hijau
32. Kacang Tanah
33. Mie Instant
34. Ikan Asin Teri
35. Ketela Pohon
36. Jagung Pipilan
37. Gas 3 kg
38. Bawang Daun
39. Terong

Seledri

41. Bawang Bombai
42. Ikan Air Tawar (Nila)
43. Ikan Kembung
44. Jeruk
45. Pisang Lokal
46. Tahu
47. Tempe
48. Udang

Berdasarkan hasil pemantauan harga selama Triwulan IV tahun 2025, maka terdapat beberapa komoditi yang mengalami perubahan harga signifikan ($\geq 20\%$) hingga akhir triwulan IV, yaitu:

1. Harga rata-rata Cabai Rawit yang mengalami kenaikan harga sebesar 139.48%.
2. Harga rata-rata Terong yang mengalami kenaikan harga sebesar 64.37%.
3. Harga rata-rata Seledri yang mengalami kenaikan harga sebesar 63.08%.
4. Harga rata-rata Kacang Tanah yang mengalami kenaikan harga sebesar 26.97%.
5. Harga rata-rata Bawang Merah yang mengalami kenaikan harga sebesar 22.33%.
6. Harga rata-rata Cabai Merah yang mengalami penurunan harga sebesar -20.89%.

Perkembangan Harga Pangan Strategis Kota Padang Panjang Periode Triwulan IV 2025

[illegible]

Berdasarkan perkembangan harga pangan dan IPH selama periode Triwulan IV Tahun 2025, komoditas Cabai Merah menjadi komoditas yang paling dominan mempengaruhi fluktuasi harga pangan di Kota Padang Panjang. Untuk IPH periode Desember 2025, komoditas Cabai Merah memiliki andil terbesar dalam meningkatkan IPH mingguan di Kota Padang Panjang. Kondisi pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang Panjang di akhir November 2025 sangat memberi pengaruh kepada ketersediaan pasokan bahan pangan dan kelancaran distribusi pangan di Kota Padang Panjang khususnya, dan di Sumatera Barat secara umum. Hal tersebut memicu terjadinya kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis di Kota Padang Panjang dan kenaikan Indeks Perkembangan Harga Kota Padang Panjang sepanjang bulan Desember 2025.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan perkembangan harga selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 6 (enam) komoditas yang mengalami fluktuasi harga sangat signifikan, yaitu Cabai Rawit, Terong, Seledri, Kacang Tanah, Bawang Merah dan Cabai Merah. Selama periode Triwulan IV, komoditas Cabai mendominasi kenaikan harga pada bulan Desember dan menjadi penentu dalam indeks perkembangan harga di Kota Padang Panjang. Kenaikan harga yang tinggi disebabkan oleh pasokan yang tidak mencukupi permintaan konsumen akibat tidak masuknya pasokan dari daerah sentra karena bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November. Bencana tersebut menghancurkan dan merusak lahan pertanian yang mempengaruhi pasokan dan rantai distribusi terputus akibat banyak longsor dan jalan yang putus. Kondisi tersebut berimbas kepada perkembangan harga pangan di Kota Padang Panjang, terutama kenaikan harga komoditas strategis seperti kelompok Cabai, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, dan Beras.					Kategori 6 RANGE (2,5±1%) RENDAH	
1	Oktober	I	-0,62	BAWANG MERAH(-0,4441), CABAI MERAH(-0,2064), TEMPE(-0,0965)	RENDAH	
2	November	I	-3,47	CABAI MERAH(-2,8753), DAGING AYAM RAS(-0,3418), PISANG(-0,3318)	RENDAH	
3	Desember	I	7,32	CABAI MERAH(4,8877), BERAS(1,1499), BAWANG MERAH(0,7155)	TINGGI	
		II	5,28	CABAI MERAH(2,4013), BERAS(1,1591), BAWANG MERAH(0,7265)	TINGGI	
		III	5,28	CABAI MERAH(2,2039), BERAS(1,1923), DAGING AYAM RAS(0,8333)	TINGGI	
		IV	4,75	CABAI MERAH(1,6485), BERAS(1,2033), DAGING AYAM RAS(0,8641)	TINGGI	

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kota Padang Panjang tetap melakukan pemantauan harga secara kontinyu harian untuk mengontrol dan menjaga daya beli masyarakat. Pemantauan harga dilakukan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, yaitu Dinas Pangan Pertanian dan Dinas Perdagkop UKM Kota Padang Panjang ke Pasar Pusat Padang Panjang dan produsen setiap hari kerja.

Sedangkan informasi harga pangan ini ditampilkan setiap hari melalui web aplikasi [infopangan.padangpanjang.go.id](https://info-pangan.padangpanjang.go.id). Dengan demikian, siapa saja yang ingin mengetahui informasi harga pangan di Kota Padang Panjang hari ini dapat mengaksesnya melalui web aplikasi <https://info-pangan.padangpanjang.go.id/>.

Selama Triwulan IV Tahun 2025, TPID Padang Panjang telah melakukan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kebijakan pengendalian inflasi, yaitu:

1. Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman parkir Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kamis (16/10/2025)
 2. Bantuan permakanaan dan sandang bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berupa paket sembako dan sandang berupa perlengkapan kebersihan pribadi, dengan total nilai bantuan mencapai Rp128.050.000. Jumlah penerima sebanyak 197 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdiri dari 74 KPM lansia terlantar dan 123 KPM penyandang disabilitas
 3. Pemerintah Kota melalui Posko Utama Tanggap Darurat Bencana di Markas Koramil 01/PP kembali menyalurkan berbagai bantuan kepada para pengungsi di sejumlah titik posko
 4. Pemko Salurkan Bantuan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Pengungsi dan Warga Relokasi Jumat (5/12/2025). Bantuan tersebut mencakup perlengkapan memasak dan makan, peralatan mandi, kompor gas lengkap dengan tabung dan regulator, magicom, dispenser beserta galon, hingga sprei berukuran 160 x 200 dan 180 x 200 serta bantal. Seluruh perlengkapan ini diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan harian warga pascarelokasi.
 5. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) salurkan bantuan lanjutan bagi warga terdampak bencana di Kota Padang Panjang. Bantuan yang disalurkan meliputi 144 paket Layanan Dukungan Psikososial (LDP), 89 paket nutrisi, 41 paket perlengkapan kamar, 14 paket perlengkapan dapur, serta 47 paket perlengkapan sekolah, dengan total nilai bantuan mencapai Rp217.933.500.
 6. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Padang Panjang salurkan bantuan sembako kepada 160 warga dari berbagai kelurahan, Kamis (18/12/2025), dengan satu paket sembako senilai Rp100.000.
 7. Wali Kota, Hendri Arnis serahkan santunan uang duka, paket sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada para ahli waris korban bencana banjir bandang dan longsor, Selasa (30/12/2025). Dari Kemensos bantuan yang disalurkan dengan total nilai Rp375 juta. BNPB menyalurkan DTH kepada 13 warga terdampak yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan memiliki rekening penerimaan. Bantuan DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penerapan kebijakan pemantauan harga bahan pangan dan stok bahan pokok dan barang penting secara kontinyu, memberi dampak dalam pengendalian harga di pasar. Di samping itu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan harga jual bahan pangan di pasar karena dapat diidentifikasi lebih awal jika terjadi fluktuasi, gejolak dan permasalahan harga yang besar dan terjadi dalam pemantauan harga tersebut.

Kebijakan pengendalian inflasi daerah selama Triwulan IV Tahun 2025 juga telah dilaksanakan evaluasi dan penyampaian laporan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan SP2KP Kementerian Perdagangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota perlu untuk tetap melakukan operasi pasar dan gerakan pangan murah dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil jika terjadi gejolak harga yang signifikan. Hal tersebut juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga untuk mendorong dan memandu pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Tim TPID Kota Padang Panjang saat ini telah melakukan koordinasi dan kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak, seperti TPID Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat, Bulog Cabang Bukittinggi, TTIC Provinsi Sumatera Barat dan TPID kabupaten/kota lain di Sumatera Barat serta Petani Champion rekomendasi Kementerian Pertanian.